

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota pada saat ini menunjukkan peningkatan yang pesat dari waktu ke waktu. Aktivitas kota selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat, Tingginya kebutuhan hidup dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di desa serta rendahnya tingkat pendapatan membuat banyaknya masyarakat melakukan urbanisasi. Hal ini yang menjadi salah satu alasan tingginya pertumbuhan penduduk di kota selain dengan pertumbuhan secara alami melalui angka kelahiran. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan terhitung sebanyak 56,4% dan diperkirakan akan terus meningkat sebanyak 61,7% pada tahun 2045. Meningkatnya penduduk akan sejalan dengan perkembangan kota yang semakin meningkat karena tingginya frekuensi aktivitas masyarakat dalam kota tersebut. Ini lah yang nantinya akan berimplikasi pada kebutuhan ruang yang semakin tinggi guna menunjang berbagai aktivitas pada suatu kota. (Yuliastuti & Fatchurochman, 2012)

Jumlah penduduk dan pertumbuhannya dapat menjadi potensi bagi suatu negara apabila didukung dengan sumber daya lain yang seimbang, tetapi sebaliknya apabila jumlah penduduk dan pertumbuhannya melampaui kapasitas wilayah tersebut maka akan menjadi beban (Triyastuti, 2019) Kepadatan penduduk akan terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan penambahan jumlah luas wilayah. Jika terjadi secara terus menerus maka akan menimbulkan permasalahan yaitu *over capacity*. Seperti halnya pada perkotaan, dimana memiliki aktivitas yang beragam dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif setiap tahunnya, mengakibatkan bertambahnya permintaan akan lahan sebagai tempat tinggal. Tetapi secara administratif, luas lahan pada suatu kota tidak akan bertambah, akhirnya menyebabkan penggunaan akan lahan menjadi semakin terbatas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. (Sari, 2017)

Penyediaan fasilitas tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, tetapi pemenuhannya tidak semudah dalam pemenuhan kebutuhan pokok

manusia yang lain seperti sandang dan pangan. Hal ini demikian karena pembangunan fasilitas tempat tinggal memerlukan penyediaan ruang dan lahan yang luas, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang terjadi di perkotaan. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan, akan menimbulkan masalah permukiman dengan pengelolaan yang kurang terkontrol. Kasus tersebut akan membawa konsekuensi pada alih fungsi lahan menjadi permukiman. Pemadatan bangunan akan terjadi disebabkan karena semua ruang perkotaan telah terisi penuh oleh permukiman yang berlangsung secara terus menerus (densifikasi) (Fitri, 2021)

Dalam Fadhillah (2023) menyebutkan bahwa permukiman memiliki peran lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan dasar manusia. Permukiman juga berfungsi untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan ekosistem, dimana terdapat keselarasan antara masyarakat dan perekonomiannya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan yang sehat dan layak. Namun, berbagai masalah permukiman di perkotaan, termasuk minimnya ketersediaan lahan, perubahan peruntukan lahan permukiman, kepadatan penduduk yang ekstrem, dan distribusi infrastruktur dasar yang tidak merata menyebabkan pada akhirnya terjadinya penurunan kualitas lingkungan permukiman menjadi kurang layak. (Rahman & Putra, 2022)

Kualitas lingkungan permukiman sering kali dijadikan sebagai faktor penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini karena kualitas lingkungan permukiman mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga baik atau buruknya kehidupan masyarakat dapat ditentukan oleh kualitas lingkungan permukimannya. Kualitas lingkungan permukiman sangat bergantung pada komponen- komponen penyusunnya, yaitu kondisi rumah, prasarana dasar permukiman, serta sanitasi lingkungan permukiman. Seluruh komponen pada suatu permukiman tersebut saling berinteraksi, yang kemudian akan menentukan standar kualitas lingkungan permukiman yang terbentuk (Ridwan & Giyarsih, 2012). Menurut Palwaka (2023) Tingkat kesejahteraan serta kenyamanan masyarakat di

suatu area sangat bergantung pada kualitas lingkungan permukiman tempat dimana mereka tinggal. Begitupun kesehatan masyarakat akan cenderung meningkat karena berkorelasi positif antara kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi kesehatan masyarakat (Priyono et al., 2013)

Kualitas lingkungan permukiman yang baik haruslah yang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan didukung juga oleh perilaku dari penghuninya (Bahari, 2016). Permukiman dengan kualitas lingkungan yang rendah umumnya dibangun secara tidak terpadu, kurang terarah, dan minim perencanaan. Selain itu pembangunan permukiman semacam ini cenderung abai terhadap kelengkapan sarana prasarana penting, seperti akses terhadap air bersih, tempat mandi dan kakus, listrik, saluran dan pembuangan air tinja, dan sistem pengelolaan sampah akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat (Adeline & Widartono, 2012). Ada tiga permasalahan merosotnya kualitas lingkungan permukiman di daerah perkotaan antara lain : (1) adanya lingkungan permukiman dengan kondisi yang buruk (2) terdapat perkampungan yang tidak tertata rapi, dimana kondisi fisik, sosial ekonomi dan kesehatan penduduknya kurang memadai; (3) terdapatnya kampung – kampung dengan prasarana lingkungan yang sangat terbatas. (Bahari, 2016)

Kota Bekasi merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Kota Jakarta Timur. Kota Bekasi menjadi salah satu kota penyangga Jakarta yang termasuk kedalam kawasan metropolitan Jakarta dan sekitarnya, yaitu Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi Provinsi dengan pusat perekonomian utama di Indonesia. Hal ini lah yang mengakibatkan tingginya arus urbanisasi karena Jakarta dijadikan sebagai tujuan untuk mendapatkan peruntungan. Pesatnya arus urbanisasi yang terjadi hingga melampaui daya tampung Jakarta, mengakibatkan daerah sekitar Jakarta digunakan sebagai alternatif tempat bermukim. Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang menjadi pilihan bermukim para komuter yang bekerja di Jakarta. Berkembangnya Kota Bekasi sangat terpengaruh dari besarnya laju urbanisasi yang terjadi. Arus

pendatang yang tinggi menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks terutama masalah permukiman.

Kota Bekasi pada awalnya berfungsi sebagai wilayah penyangga, kini telah bergeser menjadi sebagai pusat bisnis, perdagangan serta kegiatan jasa. Pergeseran fungsi ini menjadikannya daya tarik utama bagi pendatang, baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk menetap. Oleh karena itu kota ini memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, kepadatan penduduk di Kota Bekasi adalah 12.159 jiwa per km², menempati urutan ketiga sebagai Kabupaten/Kota terpadat di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung di urutan pertama dan Kota Cimahi di urutan kedua. Jumlah penduduk Kota Bekasi berjumlah 2.627,210 juta jiwa pada tahun 2023 sehingga dapat dihitung laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi setiap tahunnya sebesar 1,15% sebagaimana yang tercantum pada Kota Bekasi dalam angka 2024.

Kecamatan Pondok Gede merupakan salah satu dari dua belas kecamatan yang terdapat di Kota Bekasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi tahun 2024, Kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.048 jiwa per km² sehingga menempati urutan ke enam setelah kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan dan Rawalumbu dalam hal kepadatan penduduk.

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Bekasi

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per km² (ribu)
Pondok Gede	227.423	13.048
Jatisampurna	114.108	5.652
Pondok Melati	128.690	11.678
Jatiasih	239.159	9.858
Bantargebang	113.988	5.925
Mustikajaya	216.604	8.748
Bekasi Timur	273.703	18.696
Rawalumbu	222.398	13.199
Bekasi Selatan	214.493	13.567
Bekasi Barat	266.287	17.860
Medansatria	158.729	12.016
Bekasi Utara	338.087	16.246

Kota Bekasi	2.513.669	12.208
--------------------	------------------	---------------

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024)

Sebagai kecamatan yang terletak paling barat Kota Bekasi dan berbatasan langsung dengan Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pondok Gede dihadapkan pada berbagai dinamika permasalahan lingkungan permukiman, seperti kepadatan bangunan, kemacetan, sampah dan banjir.

Perkembangan suatu kota seringkali diiringi oleh perubahan signifikan dalam tata ruang permukiman (Putri, 2024) sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2024, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2024-2044, Kecamatan Pondok Gede dalam struktur ruangnya diarahkan menjadi pusat pemerintahan, area perdagangan grosir dan retail terpadu, serta lokasi utama untuk layanan jasa dan pendidikan. Hal itu berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kecamatan Pondok Gede, ditandai dengan banyaknya bangunan pemukiman dan pertokoan yang dibangun. Tetapi karena ketersediaan lahan yang terbatas, menyebabkan banyaknya bangunan yang dibangun saling berdempetan satu sama lain, menghasilkan tatanan bangunan yang terlihat sangat padat dan tidak rapi.

Sebagai daerah yang telah mengalami perkembangan menjadi pusat kegiatan perkotaan, Kecamatan Pondok Gede memiliki aktivitas mobilitas penduduk yang tinggi dengan disertai penambahan jumlah kendaraan yang ada, mengakibatkan kemacetan di beberapa titik jalan Kecamatan Pondok Gede, yaitu pada Jalan Raya Pondok Gede sebagai jalan arteri primer dan kawasan sekunder, Jalan Raya Jatiwaringin yang digunakan sebagai pintu masuk dari Kota Jakarta Timur menuju Bekasi, Jalan Caman Raya, dan Jalan Raya Kalimalang yang merupakan batas terluar dari Kecamatan Pondok Gede. Kemacetan seringkali terjadi pada waktu sibuk yaitu pagi hari, sore hari, maupun di hari libur. Selain terkait kemacetan, permasalahan yang kerap mengganggu di Kecamatan Pondok Gede adalah terkait sampah.

Pasar Tumpah Pondok Gede di Kota Bekasi merupakan salah satu penghasil sampah utama. Observasi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa banyak sampah masih berserakan dan pedagang belum banyak yang memakai

tempah sampah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa rata-rata sampah yang dihasilkan mencapai 4.776 kg per hari. Selain itu, partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah, dengan hanya 25% yang aktif menggunakan tempat sampah atau membantu mengumpulkan sampah. Kondisi ini diperparah oleh sistem pengumpulan dan pewadahan sampah yang belum memenuhi standar nasional, terbukti dari tidak digunakannya tempat sampah oleh pedagang, sampah yang berserakan di area berjualan, dan kurangnya TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang layak. (Suseno 2023).

Banjir merupakan salah satu permasalahan dari Kecamatan Pondok Gede. Dilansir dari beberapa laman berita, terdapat lima titik yang kerap menjadi langganan banjir jika hujan lebat mengguyur di Kecamatan Pondok gede, diantaranya Jalan Anugerah (depan Hotel Al-Hakim), Perumahan AL Jatibening, Perumahan Jatibening Permai, Perumahan Antilop. Jl. Kemangsari I. Mengingat banyaknya persoalan di Kecamatan Pondok Gede, diperlukan upaya pengelolaan berkelanjutan yang berfokus pada perbaikan lingkungan, khususnya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan pembangunan di suatu wilayah. Lingkungan permukiman yang baik akan mewujudkan lingkungan layak huni yang sehat, aman, teratur, berkelanjutan serta dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk. (Rustianto, 2021).

Penelitian terkait analisis kualitas lingkungan permukiman memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Tetapi pada wilayah Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ini belum pernah dilakukan penelitian, mengingat bahwa wilayah Kecamatan Pondok Gede berada pada lokasi yang strategis dan menjadi pusat kegiatan perkotaan sehingga menimbulkan banyak masalah yang terjadi berdasarkan uraian di latar belakang ditambah kurangnya informasi yang komprehensif, sistematis, dan spasial mengenai kondisi aktual kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan ini membuat perlunya dilakukan analisis untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan permukiman. Tujuannya untuk menciptakan permukiman yang layak, sehat, dan aman.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, dilakukan suatu penelitian terkait kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede guna mendapatkan informasi terbaru tentang kualitas lingkungan permukiman. Dalam hal ini penulis mengambil judul ***“Analisis Kualitas Lingkungan Permukiman di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi parameter kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi?
2. Bagaimana pemetaan sebaran kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi?
3. Bagaimana lokasi prioritas penanganan masalah kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kondisi parameter kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
2. Memetakan sebaran kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
3. Menganalisis lokasi prioritas untuk menangani masalah kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis, kebijakan dan praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian ilmiah terkait kualitas lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

2. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, landasan, dan informasi berupa data spasial yang telah dihasilkan untuk pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan di pemerintahan setempat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman khususnya di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait kondisi kualitas lingkungan permukiman utamanya pada Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan.

b. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi sumber literatur dalam pengembangan karya tulis ilmiah lainnya mengenai kualitas lingkungan permukiman.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan motivasi bagi masyarakat akan kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede agar senantiasa menjaga kualitas lingkungan permukiman sekitar.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada penyusunan skripsi ini memuat terkait gambaran umum sistematika penulisan pada setiap bab. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan struktur pada setiap bab berikut ini :

BAB I Bab I Pendahuluan merupakan bab awal penelitian dan terbagi ke dalam beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji.

- BAB II** Bab II Kajian Teori berisi teori teori yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Teori teori ini dijadikan sebagai panduan untuk mendukung dan memperkuat terkait masalah yang diteliti.
- BAB III** Bab III Metode Penelitian berisi teknik dan metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini terbagi ke dalam beberapa sub bab yaitu metode, lokasi dan waktu, alat dan bahan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan diagram alir penelitian
- BAB IV** Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi pemaparan hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan mengacu pada Bab I, Bab II dan Bab III
- BAB V** Bab V Penutup merupakan bab terakhir pada penelitian yang terbagi ke dalam beberapa sub bab yaitu kesimpulan, implikasi dan rekomendasi mengenai penelitian yang sudah dilakukan.